

**PEMBELAJARAN HAM DI SEKOLAH DAN TRANSFORMASI  
PEMBELAJARAN PPKN MELALUI *PROBLEM-BASED LEARNING* UNTUK  
MENINGKATKAN KESADARAN HAM SISWA**

Rachmatul Fitria Nur<sup>1</sup>, Hana Hanifah Balqis<sup>2</sup>,  
Adelweiss Afghani Zahra<sup>3</sup>, Zaenul Slam<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>PGMI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

<sup>1</sup>[rachmatulfitrianur@gmail.com](mailto:rachmatulfitrianur@gmail.com), <sup>2</sup>[hanahanifahbalqis06@gmail.com](mailto:hanahanifahbalqis06@gmail.com),  
<sup>3</sup>[edelweissafghani14@gmail.com](mailto:edelweissafghani14@gmail.com), <sup>4</sup>[zaenul\\_slam@uinikt.ac.id](mailto:zaenul_slam@uinikt.ac.id)

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the effectiveness of implementing the Problem-Based Learning (PBL) model in increasing students' Human Rights (HAM) awareness in Pancasila and Citizenship Education (PPKn) subjects. The research method used is library research with a descriptive qualitative approach. Data collection was carried out through searching reputable scientific literature, including journal articles, textbooks, and related regulatory documents. The results of the analysis indicate that conventional Civics learning which is theoretical contributes to low social sensitivity and high rates of bullying in schools. The PBL model is proven effective in overcoming these obstacles by exposing students to dilemmas and real case studies of human rights violations. Through the PBL syntax, students are encouraged to think critically, discuss in groups, and formulate solutions to human rights issues. This study concludes that the implementation of PBL in Civics education not only improves students' cognitive understanding, but also reconstructs civic disposition based on values of tolerance and respect for human rights.*

*Keywords: Human Rights Awareness; Problem-Based Learning; Civic Education; Library Research, Human Rights Violations.*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi model pembelajaran berbasis masalah (*Problem-Based Learning*/PBL) dalam meningkatkan kesadaran Hak Asasi Manusia (HAM) siswa pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*). Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur ilmiah bereputasi, termasuk artikel jurnal, buku teks, dan dokumen regulasi terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa pembelajaran PKn konvensional yang bersifat teoretis berkontribusi terhadap rendahnya kepekaan sosial dan tingginya angka perundungan di sekolah. Model PBL dinilai efektif karena siswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga dihadapkan langsung pada study kasus pelanggaran HAM yang nyata. Melalui sintaks PBL,

siswa didorong untuk berpikir kritis, berdiskusi kelompok, dan merumuskan solusi terhadap masalah HAM. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi PBL dalam PKn tidak hanya meningkatkan pemahaman kognitif siswa, tetapi juga membentuk kembali disposisi kewarganegaraan (*civic disposition*) yang berbasis pada nilai-nilai toleransi dan penghargaan terhadap HAM.

Kata Kunci : Kesadaran HAM; Pembelajaran Berbasis Masalah; PKn; Studi Kepustakaan, Pelanggaran HAM.

## **A. Pendahuluan**

Pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan elemen krusial dalam kurikulum persekolahan yang bertujuan membentuk karakter generasi muda agar memiliki sikap toleran, inklusif, dan menghargai hak sesama. Di Indonesia, internalisasi nilai-nilai HAM dilaksanakan secara sistematis melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Pembelajaran ini berperan penting dalam mentransfer pengetahuan hukum formal terkait perundang-undangan, sekaligus menanamkan kesadaran moral agar siswa dapat mengintegrasikan nilai-nilai HAM dalam perilaku sehari-hari (Huda, 2018).

Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan.

Pembelajaran PPKn sering kali masih terjebak pada metode konvensional seperti ceramah dan hafalan tekstual. Pendekatan teoretis ini menyebabkan pemahaman siswa tentang HAM hanya mandek pada tingkat kognitif rendah tanpa kedalaman kesadaran sosial. Dampaknya terlihat jelas pada maraknya kasus perundungan, intoleransi, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah yang merefleksikan gagalnya implementasi nilai HAM dalam tindakan nyata. Oleh karena itu, diperlukan transformasi pendekatan pembelajaran yang mampu menjembatani realitas sosial, baik global maupun lokal, ke dalam ruang kelas.

Salah satu inovasi pembelajaran yang relevan dan efektif untuk menjawab tantangan tersebut adalah model Pembelajaran Berbasis Masalah atau *Problem-*

*Based Learning* (PBL). Model pembelajaran ini berpusat pada siswa (*student-centered learning*) dengan cara mengonfrontasikan mereka pada situasi atau kasus nyata terkait pelanggaran HAM, seperti diskriminasi dan perundungan. Melalui model ini, siswa ditantang untuk menganalisis, mendiskusikan, dan merumuskan solusi alternatif secara kolaboratif (Rerung dkk., 2017). Implementasi PBL sangat adaptif untuk mata pelajaran PPKn karena mampu mengembangkan karakter dan disposisi kewarganegaraan (*civic disposition*) siswa agar lebih peka terhadap keadilan sosial (Amir, 2021).

Meskipun efektivitas model PBL terhadap hasil belajar secara umum telah banyak diteliti, kajian yang mengeksplorasi pengaruh spesifiknya terhadap kesadaran HAM siswa dalam konteks pembelajaran PPKn masih terbatas. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan literatur tersebut dengan mengevaluasi secara mendalam efektivitas serta langkah-langkah strategis penerapan PBL. Melalui kajian ini,

diharapkan dapat ditemukan solusi konkret untuk mengikis kesenjangan antara pemahaman teori hukum dan tindakan nyata siswa, sekaligus mereduksi problem perundungan serta intoleransi di sekolah melalui penguatan dimensi sikap dan kesadaran sosial yang berkeadilan.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode **Studi Kepustakaan (*Library Research*)** dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Zed (2014), studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data dengan cara menelaah buku, literatur, catatan, serta laporan yang berkaitan dengan masalah yang dipecahkan. Dalam praktiknya, penulis tidak melakukan observasi langsung ke lapangan atau sekolah, melainkan mengandalkan data sekunder yang berasal dari teks-teks ilmiah terpublikasi.

Metode penelitian ini dirancang dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) untuk mengkaji secara komprehensif implementasi model pembelajaran berbasis masalah dalam konteks pendidikan kewarganegaraan. Tahap pertama dimulai dengan formulasi masalah, yaitu menetapkan fokus kajian teoretis pada pedagogi Hak Asasi Manusia

(HAM) dan efektivitas model *Problem-Based Learning* (PBL) dalam meningkatkan kesadaran sosial siswa pada pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Penentuan fokus ini menjadi pemandu utama dalam membatasi ruang lingkup kajian agar analisis tetap relevan dengan urgensi pemecahan masalah yang telah dirumuskan pada bagian latar belakang.

Tahap berikutnya adalah pencarian literatur (*literature searching*) untuk mengumpulkan berbagai sumber data primer dan sekunder yang kredibel. Pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri database jurnal ilmiah bereputasi, seperti Google Scholar, SINTA, dan Garuda, menggunakan kombinasi kata kunci yang spesifik, yaitu "*Problem Based Learning*", "*Kesadaran HAM*", dan "*Pembelajaran PKN*". Melalui strategi pencarian ini, diperoleh beragam artikel penelitian terdahulu dan buku teks yang memuat konsep serta hasil eksperimen terkait topik yang diteliti.

Setelah data terkumpul, dilakukan proses evaluasi data (*data screening*) untuk menjaga kualitas dan validitas hasil kajian. Pada tahap seleksi ini, peneliti menyaring artikel jurnal nasional terakreditasi dan buku teks konseptual yang diterbitkan dalam kurun waktu terakhir guna memastikan kemutakhiran

informasi yang digunakan. Artikel yang tidak relevan secara substansi atau tidak memenuhi standar metodologi ilmiah dikeluarkan, sehingga hanya menyisakan literatur berkualitas tinggi yang benar-benar berfokus pada integrasi PBL dan dimensi kesadaran HAM.

Proses akhir dari metode ini adalah analisis dan sintesis data (*data analysis*) menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Melalui teknik ini, seluruh argumen, temuan, dan teori dari berbagai literatur ilmiah diorganisasikan, dibandingkan kesamaan dan perbedaannya, serta dikritisi secara mendalam. Hasil sintesis tersebut kemudian disajikan secara deskriptif dalam bentuk narasi argumentatif yang komprehensif untuk menjawab rumusan masalah mengenai efektivitas dan langkah strategis model PBL dalam pembelajaran PPKn.

Secara spesifik, kajian ini menyimpulkan beberapa poin arah utama, yaitu menguji efektivitas model PBL sebagai pengganti metode hafalan tradisional agar pembelajaran menjadi lebih berpusat pada siswa (*student-centered*). Selain itu, kajian ini bertujuan untuk merumuskan langkah strategis yang dapat menjembatani kesenjangan antara pemahaman teori hukum dan tindakan konkret siswa, sehingga mampu menekan masalah sosial di sekolah seperti perundungan

dan intoleransi. Pada akhirnya, melalui pendekatan studi kepustakaan ini, penelitian diarahkan untuk mengisi kekosongan riset (*research gap*) mengenai dampak nyata model PBL terhadap penguatan karakter kewarganegaraan (*civic disposition*) dan kesadaran sosial siswa yang peka terhadap keadilan sosial.

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **1.1 Penerapan Model**

Pembelajaran Berbasis Masalah dalam Meningkatkan Kesadaran Hak Asasi Manusia Siswa pada Mata Pelajaran PKN

Model Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning/PBL) merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik dengan menekankan proses pemecahan masalah yang berkaitan dengan kehidupan nyata. Dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), penerapan model ini dapat digunakan untuk membantu siswa memahami berbagai isu terkait hak asasi manusia (HAM), seperti diskriminasi, intoleransi, perundungan (*bullying*), dan

berbagai bentuk pelanggaran HAM lainnya.

Melalui model PBL, peserta didik diajak untuk menganalisis suatu permasalahan, berdiskusi secara kelompok, mengidentifikasi penyebab dan dampaknya, serta merumuskan solusi berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Pendekatan ini dinilai mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis, keterampilan berargumentasi, serta kepedulian sosial siswa terhadap pentingnya penghormatan terhadap HAM.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembelajaran berbasis masalah dalam mata pelajaran PKN memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman siswa mengenai konsep HAM sekaligus membentuk sikap tanggung jawab sebagai warga negara yang demokratis. Dengan demikian, penggunaan model ini dapat menjadi strategi efektif dalam menanamkan kesadaran HAM sejak usia sekolah.

Tahapan Penerapan PBL dalam Materi HAM dapat dilakukan melalui beberapa langkah berikut:

**1. Pengenalan masalah**

Guru memberikan contoh kasus nyata terkait pelanggaran HAM, seperti bullying atau diskriminasi sosial.

**2. Pembentukan kelompok belajar**

Siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan permasalahan yang diberikan.

**3. Pengumpulan informasi**

Peserta didik mencari data dan informasi dari berbagai sumber, seperti buku, internet, berita, atau wawancara

**4. Perumusan solusi**

Setiap kelompok menyusun solusi berdasarkan prinsip-prinsip HAM.

**5. Penyampaian hasil diskusi**

Kelompok mempresentasikan hasil analisis dan solusi yang telah dibuat.

**6. Refleksi dan evaluasi**

Guru dan siswa bersama-sama mengevaluasi pembelajaran serta

mengambil nilai moral dari kasus yang dibahas.

**1.2 Analisis Nilai-Nilai Hak Asasi**

Manusia dalam Buku Teks

Pendidikan Pancasila dan

Kewarganegaraan Tingkat SMA

Buku teks Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki fungsi penting sebagai salah satu sumber utama dalam proses pembelajaran nilai-nilai hak asasi manusia di sekolah. Materi yang terdapat dalam buku teks tidak hanya bertujuan untuk memberikan pemahaman konseptual, tetapi juga membentuk karakter peserta didik agar mampu menghargai kebebasan, kesetaraan, keadilan, serta keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat.

Berbagai nilai HAM yang umumnya termuat dalam buku teks PPKn meliputi hak memperoleh pendidikan, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, persamaan di hadapan hukum, serta penghormatan terhadap perbedaan sosial dan budaya. Namun, efektivitas penyampaian

nilai-nilai tersebut sangat bergantung pada bagaimana materi disusun dan disajikan secara kontekstual.

Analisis terhadap buku teks PPKn penting dilakukan untuk menilai sejauh mana materi yang disampaikan telah mencerminkan prinsip-prinsip HAM secara komprehensif. Beberapa tantangan yang masih ditemukan antara lain kurangnya contoh kasus aktual, penyajian materi yang terlalu teoritis, serta terbatasnya pembahasan mengenai isu-isu HAM kontemporer. Oleh karena itu, evaluasi dan pengembangan buku teks secara berkala menjadi langkah penting untuk mendukung pendidikan HAM yang lebih relevan dan bermakna bagi peserta didik.

Analisis buku teks PPKN dilakukan untuk mengetahui apakah materi yang disampaikan telah sesuai dengan prinsip-prinsip HAM dan kebutuhan peserta didik. Penilaian tersebut meliputi

- kesesuaian materi dengan prinsip HAM universal

- relevansi materi dengan kehidupan sehari-hari siswa
- penggunaan contoh yang kontekstual
- kemampuan materi dalam mendorong pemikiran kritis siswa.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sebagian buku teks masih lebih menekankan teori dibandingkan penerapan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pembahasan mengenai isu HAM modern seperti cyberbullying dan diskriminasi di media sosial masih belum banyak dibahas. Buku teks PPKn memiliki peranan penting dalam menanamkan nilai-nilai HAM kepada peserta didik. Oleh sebab itu, materi yang disajikan perlu dibuat lebih kontekstual, relevan, dan kritis agar pendidikan HAM dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.

### **1.3 Tantangan Guru PKn dalam Menanamkan Nilai Toleransi dan Anti-Perundungan sebagai Bentuk Penegakan Hak Asasi Manusia**

Guru Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tanggung jawab besar dalam menanamkan nilai-nilai toleransi, penghormatan terhadap sesama, serta sikap anti-perundungan sebagai bagian dari implementasi pendidikan hak asasi manusia di lingkungan sekolah. Peran ini menjadi semakin penting mengingat masih tingginya kasus intoleransi dan perundungan yang terjadi di kalangan peserta didik.

Dalam pelaksanaannya, guru menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kesadaran siswa terhadap dampak negatif bullying, pengaruh lingkungan sosial dan media digital, keterbatasan metode pembelajaran yang inovatif, serta kurangnya dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar. Selain itu, belum semua sekolah memiliki budaya yang sepenuhnya mendukung terciptanya lingkungan belajar yang aman,

inklusif, dan menghargai keberagaman.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, guru dapat menerapkan berbagai strategi pembelajaran, seperti diskusi kelompok, studi kasus, simulasi penyelesaian konflik, serta penguatan pendidikan karakter dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Kolaborasi antara guru, sekolah, dan orang tua juga menjadi faktor penting dalam membangun kesadaran peserta didik mengenai pentingnya toleransi dan penghormatan terhadap hak orang lain.

Dengan upaya yang berkelanjutan, pendidikan PKn dapat menjadi sarana efektif dalam membentuk generasi muda yang memiliki sikap empati, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, dan berkomitmen terhadap penegakan hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Beberapa kendala yang dihadapi guru PKn dalam menanamkan nilai toleransi dan anti-bullying antara lain:

- pengaruh lingkungan sosial yang negatif
- meningkatnya penggunaan media sosial yang memicu cyberbullying
- kurangnya perhatian keluarga terhadap perkembangan sosial anak
- rendahnya pemahaman siswa mengenai dampak bullying
- keterbatasan metode pembelajaran yang inovatif
- masih adanya budaya senioritas di lingkungan sekolah.

Strategi Guru PKn dalam Mengatasi Bullying Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, guru dapat menerapkan beberapa langkah, seperti:

- menggunakan metode diskusi kelompok
- melakukan simulasi penyelesaian konflik
- memberikan konseling sederhana kepada siswa

- memberikan teladan perilaku toleran
- mengadakan kampanye anti-bullying di sekolah
- menjalin kerja sama dengan orang tua dan pihak sekolah.

1.4 pengembangan media dan pembelajaran digital berbasis studi kasus pelanggaran HAM untuk siswa smp.

Pengembangan media pembelajaran digital di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) menjadi sebuah urgensi yang tidak dapat dihindari pada era disrupsi teknologi saat ini. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh [Fadila dkk. \(2024\)](#), sebagian besar bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di era digital, seperti perundungan siber (*cyberbullying*) dan pencemaran nama baik, justru melibatkan generasi muda, baik sebagai pelaku maupun korban. Kenyataan lapangan ini diperkuat oleh studi [Rizkiani \(2021\)](#) yang menegaskan bahwa materi pendidikan HAM konvensional

sering kali gagal menarik perhatian siswa karena disampaikan secara teoritis dan abstrak. Oleh karena itu, digitalisasi media pembelajaran di sekolah menengah tidak sekadar berfungsi sebagai alat bantu visual, melainkan menjadi jembatan pedagogis untuk mentransformasikan nilai-nilai HAM yang kaku menjadi informasi yang lebih interaktif, kontekstual, dan mudah diakses oleh karakteristik siswa SMP yang merupakan *digital natives*.

Integrasi metode studi kasus (*case-based learning*) ke dalam media digital terbukti secara signifikan mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam menganalisis fenomena sosial. Merujuk pada temuan [Fitriyani dan Nugroho \(2022\)](#), pergeseran paradigma dari model pembelajaran tradisional ke metode berbasis kasus digital memaksa siswa untuk keluar dari zona hafalan dan mulai beradaptasi dengan analisis masalah yang nyata. Karakteristik utama dari pembelajaran berbasis kasus digital ini adalah

menempatkan siswa pada skenario kehidupan nyata, sehingga mereka didorong untuk aktif berpartisipasi, bekerja sama dalam tim, dan merumuskan solusi atas konflik yang disajikan. Proses diskusi intensif dan pemecahan masalah secara kolaboratif dalam platform digital ini tidak hanya mengasah kecerdasan kognitif siswa, tetapi juga menumbuhkan keterampilan interpersonal yang sangat krusial bagi kesiapan profesional mereka di masa depan.

Dalam konteks pengajaran HAM untuk siswa SMP, penggunaan studi kasus mengenai pelanggaran HAM yang dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa—seperti perundungan di sekolah atau diskriminasi digital—menjadi konten utama yang paling efektif. Penelitian dari Maharani (2024) menunjukkan bahwa remaja usia sekolah menengah pada umumnya belum menyadari sepenuhnya bahwa aktivitas digital mereka sering kali bergeser menjadi tindakan pelanggaran HAM orang lain. Melalui media digital yang dikembangkan, kasus-

kasus tersebut dikemas dalam bentuk narasi interaktif atau komik digital. Pengemasan ini senada dengan pandangan [Snauwaert \(2019\)](#) yang menyatakan bahwa struktur pendidikan HAM yang normatif harus ditopang oleh tiga pilar utama, yaitu dimensi etika, moral, dan berpikir kritis, guna membangun kapasitas serta kesadaran warga negara masa depan. Dengan menganalisis kasus secara mandiri melalui media tersebut, siswa SMP dapat mengidentifikasi hak dan kewajiban asasi mereka secara lebih empati.

Efektivitas dari pengembangan media pembelajaran berbasis digital ini juga berkaitan erat dengan peningkatan keterlibatan (*engagement*) dan motivasi belajar siswa. Studi kasus yang dianalisis oleh [Triyanto dkk. \(2025\)](#) mengindikasikan bahwa penggunaan media digital interaktif, seperti video animasi dan infografis berbasis kasus, mampu memobilisasi ketertarikan siswa secara masif dibandingkan teks linear. Ketika materi pelanggaran HAM yang berat

maupun ringan divisualisasikan dengan baik, siswa cenderung lebih aktif dalam sesi diskusi kelas dan memiliki retensi ingatan yang lebih lama mengenai materi tersebut. Keterlibatan aktif ini tercipta karena media digital menyediakan lingkungan belajar yang aman dan fleksibel, di mana siswa dapat mengeksplorasi kronologi kasus, menganalisis dampak pelanggaran bagi korban, serta memahami regulasi hukum yang berlaku tanpa merasa digurui.

Meskipun media pembelajaran digital berbasis studi kasus ini menawarkan banyak keunggulan pedagogis, implementasinya di tingkat SMP tetap menghadapi tantangan nyata yang bersumber dari kesiapan infrastruktur dan kompetensi guru. Seperti yang diungkapkan dalam penelitian kualitatif oleh [Jbasic \(2023\)](#), kendala utama pemanfaatan media digital di sekolah sering kali berakar pada kurangnya keahlian teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di kalangan tenaga pendidik, baik guru muda maupun guru senior, serta

keterbatasan fasilitas gawai dan jaringan internet yang belum merata. Oleh karena itu, keberhasilan jangka panjang dari pengembangan media pembelajaran ini tidak hanya bergantung pada kualitas perangkat lunak atau aplikasi yang dirancang, melainkan juga membutuhkan komitmen sekolah dalam melakukan pelatihan berkala bagi guru serta penyediaan sarana teknologi pendukung agar proses internalisasi nilai-nilai HAM digital dapat berjalan secara optimal dan inklusif.

#### **D. Kesimpulan**

Penerapan model *Problem-Based Learning* (PBL) dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) terbukti sebagai pendekatan inovatif yang efektif untuk meningkatkan kesadaran Hak Asasi Manusia (HAM) siswa melalui enam tahapan sistematis. Melalui rangkaian pengenalan masalah dari kasus nyata, pembentukan kelompok belajar, pengumpulan informasi, perumusan solusi, penyampaian hasil diskusi, hingga refleksi bersama, model yang

berpusat pada siswa (*student-centered*) ini berhasil menggantikan metode hafalan tradisional yang kaku. Pendekatan berbasis pemecahan masalah kontekstual tersebut mampu mengasah kemampuan berpikir kritis dan keterampilan berargumentasi, serta menumbuhkan kepedulian sosial yang nyata dalam menguatkan pemahaman siswa terhadap nilai-nilai keadilan.

Di sisi lain, analisis terhadap buku teks PPKn menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan evaluasi materi secara berkala agar lebih akomodatif terhadap isu-isu HAM kontemporer. Buku teks di sekolah saat ini dinilai masih terlalu teoritis, kurang menyajikan contoh kasus aktual, serta belum optimal dalam mengintegrasikan fenomena pelanggaran HAM modern, seperti *cyberbullying* dan diskriminasi di media sosial. Keterbatasan muatan buku teks ini berdampak langsung pada munculnya berbagai tantangan nyata bagi guru di lapangan, mulai dari rendahnya empati siswa dan pengaruh buruk lingkungan digital, hingga kurangnya dukungan dari pihak keluarga dalam membendung

budaya senioritas serta intoleransi di lingkungan sekolah.

Untuk menjembatani kesenjangan tersebut, pengembangan media pembelajaran digital berbasis studi kasus pelanggaran HAM bagi siswa sekolah menengah menjadi sebuah urgensi pedagogis yang tidak dapat dihindari. Integrasi konten kasus riil ke dalam media digital interaktif, seperti komik digital atau video animasi, mampu mentransformasikan nilai-nilai HAM yang abstrak menjadi informasi yang lebih menarik bagi karakteristik siswa generasi *digital natives*. Sinergi antara implementasi sintaks PBL, pembaruan materi buku teks yang kontekstual, dan pemanfaatan media digital yang inovatif akan membantu guru PPKn mengatasi tantangan perundungan secara inklusif, sekaligus membentuk karakter generasi muda yang toleran, responsif, dan berkomitmen terhadap penegakan HAM dalam kehidupan sehari-hari.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Huda, Miftahul. *Model-model pengajaran dan pembelajaran: Isu-isu metodis dan paradigmatis*. Pustaka pelajar, 2013.

Zed, Mestika. *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008.

Herawati. 2022. "Penerapan Problem Based Learning dalam Pembelajaran PKn untuk Meningkatkan Kesadaran HAM Peserta Didik." *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*.

Komar, dan Hainun. 2024. "Analisis Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia dalam Buku Teks Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan." *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan (JUPANK)*.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. 2023. "Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan."

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. 2023. "Kurikulum Merdeka."

[UNESCO Human Rights Education] 2023. "Human Rights Education."

[UNICEF Indonesia]( 2023. "Perlindungan Anak dan Pencegahan Bullying." Diakses pada Mei 2026.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. 2023. "Pencegahan Kekerasan dan Bullying pada Anak."

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan. 2022. "Peran Guru PKn dalam Menanamkan Nilai Toleransi dan Anti-Bullying di Sekolah." Diakses dari [Jurnal Pendidikan

Kewarganegaraan]([https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPPKn/article?utm\\_source=chatgpt.com](https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPPKn/article?utm_source=chatgpt.com))

Jurnal Pendidikan dan Konseling. 2022. "Efektivitas Model Problem Based Learning dalam Pembelajaran PKn." Diakses dari [Jurnal Pendidikan dan Konseling]([https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/9678?utm\\_source=chatgpt.com](https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/9678?utm_source=chatgpt.com))

Fadila, A., dkk. (2024). Analisis pelanggaran hak asasi manusia di era digital. *HAKIM: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 2(1), 15-25.

Fitriyani, N., & Nugroho, A. (2022). Penerapan case-based learning dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa sekolah menengah. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, 14(3), 3120-3132.

Jbasic, R. (2023). Tantangan dan kompetensi guru dalam implementasi media pembelajaran digital di sekolah menengah pertama. *Jurnal Basicedu*, 7(2), 1145-1156.

Maharani, S. (2024). Kesadaran hukum dan pelanggaran HAM digital pada kalangan remaja usia sekolah. *HAKIM: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 2(2), 89-98.

Rizkiani, D. (2021). Pembelajaran HAM konvensional vs digital: Studi komparatif motivasi belajar siswa SMP. *Jurnal Abdi Masyarakat*, 4(1), 45-53.

Snauwaert, D. (2019). Human rights education: Ethics, morality, and critical thinking in political science. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 32(4), 412-423.

Triyanto, T., dkk. (2025). Pemanfaatan media interaktif berbasis digital untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran sosial. *Jurnal Pengabdian UMRI*, 7(1), 76-85.